

# LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT

**HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR  
KELAS I A KHUSUS  
TRIWULAN III TAHUN 2024**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 14 Tahun 2017**



## LEMBAR PENGESAHAN

# LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT

## HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS TRIWULAN III TAHUN 2024

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Makassar  
Pada Hari Selasa, 8 Oktober 2024



Sekretaris Tim Survei,  
  
NURIYA AWAD, S.H.  
NIP. 197503302000032002

Ketua Tim Survei,  
  
SUTISNA SAWATI, S.H.  
NIP. 197311231999031007

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga kami Tim Survey Pengadilan Negeri Makassar mampu menyelesaikan Laporan Rencana Tindak Lanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2024.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus , yang diambil secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER).

Semoga hasil laporan ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dan bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan seluruh unit pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Makassar, 8 Oktober 2024

**Tim Survei**

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAUDUL.....</b>	<b>1</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>5</b>
A.    Latar Belakang.....	5
B.    Tujuan dan Sasaran.....	6
C.    Prinsip .....	6
D.    Pelaksanaan .....	7
E.    Tahapan Pelaksanaan.....	7
<b>BAB II HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB III RENCANA TINDAK LANJUT 3 (TIGA) UNSUR TERENDAH HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT</b> .....	<b>11</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>12</b>
A.    Kesimpulan.....	12
B.    Rekomendasi.....	13
<b>RUJUKAN: .....</b>	<b>14</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>15</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik non profit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam kebutuhan masyarakat baik umum ataupun kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan yang berkwalitas.

Filosofi berdirinya pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi dan kebutuhan masyarakat para pencari keadilan yang memiliki karakteristik kebutuhan publik yang perlu pengaturan dalam pemenuhannya. Memberikan pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering terlupakan akibat permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yang semakin rumit dan kompleks.

Meskipun fungsi utama Pemerintah memberikan pelayanan publik namun dalam pelayanan publik diberikan mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan di luar ketentuan, dan ketidakpastian penyelesaian. Pencitraan tersebut sangat erat kaitannya dengan karakteristik pelayanan publik itu sendiri, dimana Pelayanan publik cenderung bersifat mengatur sehingga sangat jauh dari pelayanan yang baik. Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering terlantarnya upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah untuk memperbaiki kualitas layanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan media sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu

upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus melaksanakan survei kepuasaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

### **B. Tujuan dan Sasaran**

Survei kepuasaan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus . Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

### **C. Prinsip**

Dalam melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Transparan

Hasil survey kepuasan masyarakat harus dipublikasikan pada website resmi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat

2. Partisipatif

Dalam melaksanakan survei melibatkan peran serta masyarakat serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya

3. Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam Survey Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku

4. Berkesinambungan

Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan

5. Keadilan

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa mebedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan, dan lokasi geografis serta kapabilitas fisik dan mental

6. Netralitas

Dalam melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak.

#### **D. Pelaksanaan**

Pengukuran/survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus ini dilaksanakan pada bulan Juli s/d September 2024.

#### **E. Tahapan Pelaksanaan**

Tahapan pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, antara lain:

1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan **Teknik Sampel Morgan dan Krejcie**.

2. Tim survei menyiapkan fasilitas untuk pengambilan responden secara elektronik yaitu 1 komputer /pc, melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) dimana instrument kuesioner pada Aplikasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3. Memastikan bahwa computer/pc yang digunakan untuk melaksanakan survei sudah terkoneksi dengan internet
4. Membuka browser / peramban halaman website
5. Membuka alamat website :  
<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/1099422>
6. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.
7. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

## BAB II

### HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) sejumlah 28 data. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebesar **87,20%** atau pada nilai **3,49** berada pada kategori “**BAIK**” (pada interval 76,61 – 88,30). Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang telah ditetapkan pada tahun 2024 sebesar **90%**. Hasil tersebut belum mencapai sasaran mutu yang ditetapkan Pengadilan Negeri Makassar.

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 6  
Hasil  
Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan  
di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Nomor	Unsur Persyaratan Pelayanan	NRR	IKM Perunsur	Ket.
1	Kesesuaian Persyaratan	3,464	86,6	Baik
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	3,464	86,6	Baik
3	Waktu Pelayanan	3,286	82,15	Baik
4	Biaya/Tarif	3,393	84,825	Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,464	86,6	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,607	90,175	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,571	89,275	Sangat Baik
8	Sarana Prasarana	3,429	85,725	Baik
9	Penanganan Masukan dan Saran	3,714	92,85	Sangat Baik

Berikut ini 3 unsur terendah pada Hasil Survey Kepuasan Masyarakat TRIWULAN III TAHUN 2024.

No.	Ruang Lingkup	Indeks	Nilai
1	Indikator Sarana dan Prasarana (U8)	3,429	96
2	Indikator Biaya/Tarif (U4)	3,393	95
3	Indikator Waktu Penyelesaian (U3)	3,286	92

Adapun Rencana Tindak Lanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat TRIWULAN III TAHUN 2024 akan disajikan pada Bab 3.

**BAB III**  
**RENCANA TINDAK LANJUT**  
**HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**

Adapun Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar untuk meningkatkan pelayanan yaitu sebagai berikut.

<b>No</b>	<b>Prioritas Unsur</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Tahun 2024</b>			<b>Tahun 2025</b>			<b>Penanggungjawab</b>
			<b>Okt</b>	<b>Bln. Nov</b>	<b>Bln. Des</b>	<b>Bln. Jan</b>	<b>Bln. Feb</b>	<b>Bln. Mar</b>	
1	Indikator Sarana dan Prasarana (U8)	Meningkatkan kualitas fasilitas dan prasarana pada layanan Pengadilan Negeri Makassar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Panitera dan Sekretaris
2	Indikator Biaya/Tarif (U4)	Mempublikasi seluruh biaya/tarif pelayanan PRSP PN Makassar pada website, social media, dan PRSP PN Makassar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Panitera dan Sekretaris
3	Indikator Waktu Penyelesaian (U3)	Memberikan pembekalan kepada petugas PRSP untuk bisa memberikan layanan secepat mungkin, Mempublikasikan standar pelayanan yang ada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Panitera dan Sekretaris

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebesar **87,20%** dan pada skala 4 sebesar **3,49** berada pada kategori **SANGAT BAIK**. Capaian ini tidak mencapai target pada IKU (Indikator Kinerja Utama) yang telah ditetapkan ditahun 2023 sebesar 90%. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan nilai rata-rata per unsur **3,464** berada pada kategori **BAIK**
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan nilai rata-rata per unsur **3,464** berada pada kategori **BAIK**
3. Waktu Penyelesaian di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan nilai rata-rata per unsur **3,286** pada kategori **BAIK**
4. Biaya/Tarif pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan nilai rata-rata per unsur **3,393** pada kategori **BAIK**
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan nilai rata-rata per unsur **3,464** pada kategori **BAIK**
6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan nilai rata-rata per unsur **3,607** pada kategori **SANGAT BAIK**
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan nilai rata-rata per unsur **3,571** pada kategori **SANGAT BAIK**
8. Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan nilai rata-rata per unsur **3,429** pada kategori **BAIK**

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan nilai rata-rata per unsur **3,714** pada kategori **SANGAT BAIK**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; Biaya/Tarif Pelayanan; dan Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.

## B. Rekomendasi

Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, hendaknya meningkatkan pelayanannya khususnya pada ruang lingkup Sistem, Mekanisme, Prosedur, Waktu Pelayanan, dan Keseuaian Persyaratan. Berdasarkan hasil survei ini, ketiga ruang lingkup tersebut berada pada kategori sangat baik akan tetapi berada pada unsur terendah, sehingga untuk melaksanakan pelayanan secara maksimal agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Petugas PTSP meningkatkan kedisiplinan dalam mematuhi jam kerja pelayanan di meja PTSP
2. Agar Petugas PTSP memahami SOP pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi.
3. Agar Petugas PTSP diberikan pelatihan dan sosialisasi untuk SOP serta penerapan Reward dan Punishment
4. Agar Petugas PTSP senantiasa menyiapkan checklist di meja PTSP masing-masing

## RUJUKAN:

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/ 2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Ridwan. 2008. Dasar-dasar Statistik. Penerbit Alfa Beta. Bandung.

Saifuddin Azwar. 2009. Penyusunan Skala Psikologi. Makassar: Pustaka Belajar

Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 2. Penerbit ANDI Offset.

Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 3 Penerbit ANDI Offset.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN.

**Dashboard SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT**

Survey Kepuasan Masyarakat | Surveilance

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pemerintah hadir yang mengacu pada peraturan KEMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017.

**Data Responden**  
Pendaftaran dan pengisian

**Layanan**  
Layanan

**Form Kuesioner**  
Isi form kuesioner di sini

**Data Responden SKM**

Nama	Umur / Jenis Kelamin*	Alamat tinggal/lokasi kerja	Pilih Jenis Kelamin
Umar, 18 Tahun	Umar	Jl. Cendekia No. 12	Pilih Jenis Kelamin
0822 1234 5678	0822 1234 5678	...	...
Dominik	Ptk. Wayph	...	...
Pendidikan*	Ptk. Pendidikan	...	...
Pekerjaan*	Ptk. Pekerjaan	...	...

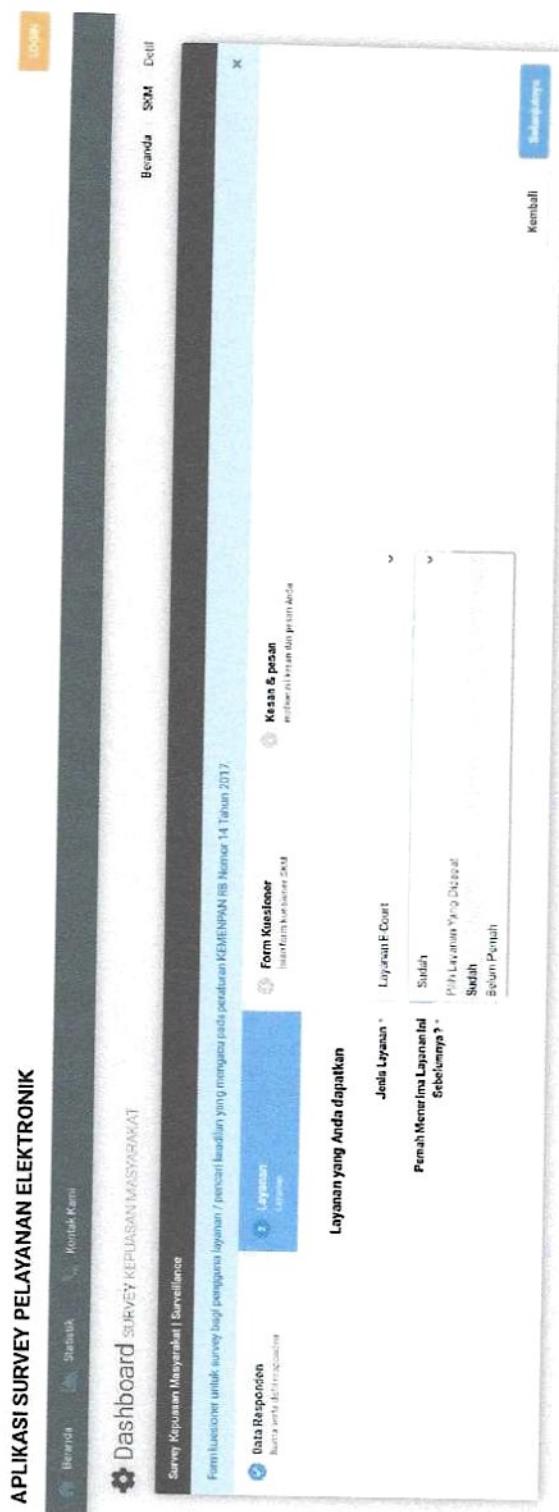
Kembali

Kembali

**APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK**

The screenshot displays the main interface of the "APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK". At the top, there's a navigation bar with "Dashboard", "Survey Kepuasan Masyarakat", "Statistik", "Kontrak Kom.", and "Logout". Below the dashboard, there are several sections:

- Survey Kepuasan Masyarakat | Surveillance**: A section titled "Form kisi-kisi untuk survey bagi pengguna layanan / pemangku kepentingan yang mengajukan permohonan KEMENPAN/RB Nomor 14 Tahun 2017". It includes tabs for "Layanan" (selected), "Layanan Lainnya", and "Kesan & pesan".
- Data Responden**: A section for entering respondent information.
- Layanan yang Anda dapatkan**: A list of services provided, categorized by "Jenis Layanan" (e.g., Pendaftaran Visa/Bijan, Pengajuan Visa/Urgensi, Layanan Perdata, Layanan Peradilan, Layanan Hukum/Informasi, Layanan Administrasi Umum, Layanan Haji, Layanan Pajak, Layanan Telpur, Layanan E-Court, Layanan Terape).
- Beranda**, **SMA**, **Dwi**, **Kesuaian**, **Rembali**, and **Ubah jawaban** buttons are located along the right side of the page.



**APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK**

The screenshot shows a survey application interface. At the top, there's a header bar with 'Beranda', 'SKM', and 'Draf'. Below it is a navigation bar with 'Beranda', 'Survei', and 'Kontak Kami'. The main area is titled 'Dashboard SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT' and includes a note: 'Perintah khusus untuk survei bagi pengguna layanan / pemohon izin yang mengakuinya pada peraturan KEMENHUKR RI Nomor 14 Tahun 2017.' There are four tabs: 'Data Responden' (with 0 responses), 'Layanan' (selected), 'Survei Berjalan' (with 0 surveys), and 'Kesan & pesan' (with 0 messages). The survey consists of 10 questions:

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayannnya pada Pengadilan ?  
Tidak Sesuai  
Kurang Sesuai  
Sesuai  
Sangat Sesuai
2. Bagaimana pengetahuan Saudara tentang keruhtuhan prosesnya pelayanan pada Pengadilan ?  
Tidak Mudah  
Kurang Mudah  
Mudah  
Sangat Mudah
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ?  
Tidak Cepat  
Kurang Cepat  
Cepat  
Sangat Cepat
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang pelayanan pada Pengadilan TIDAK DIPUNGUT BIAYA GRATIS ?  
Tidak Sesuai  
Kurang Sesuai  
Sesuai  
Sangat Sesuai
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian hasil yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan ?  
Tidak Sesuai  
Kurang Sesuai  
Sesuai  
Sangat Sesuai
6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ?  
Tidak Kompeten  
Kurang Kompeten  
Kompeten  
Sangat Kompeten
7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam pelayanan ?  
Tidak Sepan dan Ramah  
Kurang Sepan dan Ramah  
Sepan dan Ramah  
Sangat Sepan dan Ramah
8. Bagaimana pendapat Saudara tentang sumber dan prasarananya yang memungkinkan dalam pelayanan ?  
Banyak  
Cukup  
Banyak  
Sangat Banyak
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang laman pengadilan pengguna pelayanan ?  
Tidak ada  
Ada tetapi tidak dapat diakses  
Kurang mudah  
Difungsikan dan diakses dengan baik

At the bottom right, there are 'Kembali' and 'Simpan' buttons.

**APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK**

Foto ini bukti bahwa saya telah mengisi form survey kepuasan masyarakat pada Pengadilan Negeri Makassar  
Klik Kotak di bawah Saya bukan robot' sebelum verifikasi. Anda sebagai manusia bisa bukan sebagai bot kemudian klik tombol SIMPAN DATA dibawah untuk menyimpan data survey Anda.

Klik Kotak di bawah Saya bukan robot' sebelum verifikasi. Anda sebagai manusia bisa bukan sebagai bot kemudian klik tombol SIMPAN DATA dibawah untuk menyimpan data survey Anda.

Saya bukan robot

**SIMPAN DATA**



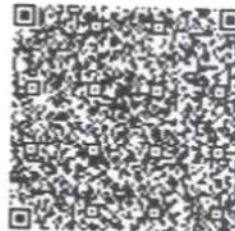
## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jln. R.A. Kartini No. 18/23 KOTA MAKASSAR

SULAWESI SELATAN

<http://www.pn-makassar.go.id/>



### PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Periode 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024

**SURVEY KEPUASAN  
MASYARAKAT**

#### **NILAI INDEKS**

**3,49 / 87,20 %**

Jumlah	28 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 18	
	PEREMPUAN : 10	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	Diploma 2 : 0
	SD : 0	Diploma 3 : 1
	SMP : 0	S1 : 17
	SMU : 2	S2 : 4
	Diploma 1 : 0	S3 : 4
Pekerjaan	PNS : 0	SWASTA : 6
	TNI : 0	WIRASAHA : 0
	POLRI : 0	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 33	

#### Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan ?                               | 3,429 |
| 2. Bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan SESUAI DENGAN TARIF RESMI ? | 3,393 |
| 3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ?                             | 3,286 |

#### Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

DATA REGISTER TINDAK LANJUT BELUM DIISI

**Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.**

1 Oktober 2024  
Ketua Pengadilan Negeri

-25-

**LAMPIRAN II**

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN  
MASYARAKAT  
UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Untuk memudahkan pengambilan sampel tanpa menghitung, dapat melihat pada tabel berikut :

**Tabel 1 Sampel Morgan dan Krejcie**

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367

-26-

130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

ttd

ASMAN ABNUR